

**UPAYA KEPOLISIAN DAERAH RIAU (POLDA RIAU) DALAM MENGATASI  
KASUS KEJAHATAN TRANSNASIONAL PEREDARAN NARKOBA  
DI PROVINSI RIAU STUDI KASUS PEREDARAN NARKOBA  
DI KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2017-2018**

**Oleh: Putri Eka Lestari**

*putri.ekalestari@student.unri.ac.id*

**Pembimbing: Faisyal Rani, S.IP., MA**

Bibliografi: 7 Jurnal, 29 buku, 3 Dokumen, 1 Majalah, 2 Wawancara, 5 Website

Jurusan Ilmu Hubungan Internasional

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya, Jl. H.R. Soebrantas Km. 12,5 Simp. Baru, Pekanbaru 28293

Telp/Fax. 0761-63277

***Abstract***

*This study describes the efforts of the Riau Regional Police in preventing cases of transnational drug trafficking in the Riau Province, especially in the district of Bengkalis. The geographical condition of Riau Province, which consists of several islands close to the international waterway boundary of the Malacca Strait, has the potentially becoming the target of narcotics smuggling with a relatively short travel time supported by the presence of unofficial ports which are separate from the government supervision, making the island the destination of drug smuggling. This study uses a pluralism perspective, level analysis of nation states, theories of international cooperation, and non-traditional security concepts. Research data is obtained from several sources such as books, journals, official documents, and website as a support. The method used is a qualitative research method. This analysis is based on data obtained from interviews and field surveys that have been written in field notes or official documents. The results of this study indicate that the efforts made by the Riau Regional Police are by collaborating with the Marin Territory Police of the Malaysian Royalty Police (PDRM) Johor Bahru through the implementation of rendezvous which discusses cross-border crime cases that occur along the Malacca Strait international watershed. From the rendezvous implementation, it was agreed that both parties agreed to exchange information, tighten water patrols, and routinely conduct rendezvous every year to overcome transnational crimes that occurred between the two countries.*

***Keyword: Effort, Drug Smuggling, Riau Regional Police, Malaysian Police, Bengkalis District.***

## I. PENDAHULUAN

Penelitian ini merupakan salah satu kajian hubungan internasional yang membahas tentang upaya Kepolisian Daerah Riau (Polda Riau) dalam mencegah kasus kejahatan transnasional peredaran narkoba di Provinsi Riau dengan studi kasus peredaran narkoba yang terjadi di Kabupaten Bengkalis. Perlu diketahui bahwa kejahatan transnasional tidak dapat dilepaskan dari era globalisasi dewasa ini. Kejahatan transnasional dapat disebut sebagai sisi negatif dari globalisasi.<sup>1</sup>

Globalisasi yang disertai dengan kemajuan teknologi komunikasi yang pesat menyebabkan hubungan antar bangsa, antar masyarakat dan antar individu semakin dekat, saling tergantung dan saling mempengaruhi sehingga tercipta suatu dunia tanpa batas (*borderless world*). Pergerakan lintas batas negara yang semakin tinggi inilah yang akhirnya menimbulkan permasalahan baru yang juga muncul antar lintas negara yang dikenal dengan istilah *transnational crimes* atau kejahatan transnasional. Sejalan dengan hal itu, fenomena kejahatan transnasional terus mengemuka merambah ke berbagai penjuru dunia.<sup>2</sup>

Salah satu wujud dari kejahatan transnasional yang paling krusial yang kini tengah marak terjadi ialah mengenai kasus peredaran narkoba. Peredaran narkoba dengan mudah dapat menembus batas-batas negara di dunia melalui jaringan manajemen yang rapi

dan teknologi yang canggih. Dampak dari peredaran narkoba ini semakin meluas dan meningkat hampir di setiap negara berkembang.<sup>3</sup> Salah satu contohnya adalah Indonesia tepatnya di wilayah Provinsi Riau. Provinsi Riau merupakan provinsi yang terdiri dari banyaknya pulau-pulau serta merupakan wilayah yang strategis untuk dijadikan tempat transit ataupun tujuan penyelundupan narkoba karena sebagian besar wilayahnya merupakan daerah pesisir. Hal ini didukung dengan letaknya yang berada dekat dengan negara tetangga seperti Malaysia dan juga perairan internasional Selat Malaka. Ditambah lagi di sepanjang perbatasan pulau-pulau yang terdapat di Provinsi Riau banyak sekali terdapat pelabuhan-pelabuhan yang tidak resmi atau illegal sehingga mempermudah ruang gerak bagi para sindikat narkoba internasional untuk menyelundupkan narkoba ke pelabuhan-pelabuhan tidak resmi tersebut. Salah satu pulau yang terdapat di Provinsi Riau adalah Pulau Bengkalis yang terdapat di Kabupaten Bengkalis. Letak Kabupaten Bengkalis yang berada dekat dengan perbatasan Selat Malaka membuat perairan di sekitar Kabupaten Bengkalis menjadi tempat sasaran penyelundupan dari Malaysia. Didukung dengan banyaknya jumlah pelabuhan yang tidak resmi tepatnya di muara sungai di perbatasan membuat Kabupaten Bengkalis menjadi destinasi favorit dalam menyelundupkan narkoba.

Peredaran dan perdagangan narkoba (*drugs trafficking*) merupakan isu yang menunjukkan bahwa lemahnya pengawasan pemerintah

---

1 Wang, Peng dan Jingyi Wang. 2009. Transnational Crime: Its Containment Through International Cooperation. *Asian Social Science*, Vol. 5, No. 11. hal. 25.

2 Mely Cabalero-Anthony. *Challenging Change: Non Traditional Security, Democracy and Regionalism*, dalam K. Emmerson. 2009. *Hard Choices: Security, Democracy and Regionalism in Southeast Asia*. Singapura: ISEAS Publishing. Hal. 193-194.

---

3 Sarah dan Pazli. 2014. Efektifitas ASOD (Asean Senior Officials on Drugs Matters) dalam Menanggulangi Industri Narkotika di Kawasan ASEAN 2004-2009. *Jurnal Transnasional*, Vol. 5, No. 2. Universitas Riau: FISIP. hal. 1122.

negara terutama di titik-titik masuk ke dalam wilayah sehingga menyebabkan mudahnya pelaku kejahatan transnasional ini bergerak. Ditambah lagi dengan kecanggihan teknologi dan transportasi yang mampu menembus pemasaran obat terlarang ini semakin merebak ke dalam negeri dengan cara melalui jalur illegal. Letak yang dekat dengan laut dan pantai membuat Provinsi Riau tepatnya di Kabupaten Bengkalis mudah diakses oleh oknum-oknum pengedar narkoba di jalur pelayaran. Terdapat 15 jumlah pelabuhan resmi (legal) yang tersebar di seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Bengkalis serta 12 jumlah pelabuhan tidak resmi (illegal/pelabuhan tikus) yang juga tersebar di seluruh kecamatan yang terdapat di Kabupaten Bengkalis.<sup>4</sup> Para penyelundup narkoba memang selalu mencari celah dalam memasukkan narkoba ke Provinsi Riau, terutama di Kabupaten Bengkalis. Biasanya sindikat tersebut menggunakan pintu masuk yang tidak melewati alat-alat deteksi terutama melalui pelabuhan antarpulau dan pelabuhan tidak ramai lainnya atau kawasan-kawasan pantai. Mereka memanfaatkan kelemahan pengamanan di laut dan perairan, serta pelabuhan untuk memasukkan narkoba ke tanah air. Para penyelundup juga lebih menyukai membawa narkoba dalam paket besar melalui jalur laut dan antarpulau.<sup>5</sup> Tercatat sebanyak 186 kasus peredaran narkoba di tahun 2017

---

4 Laporan Anev Tahun 2017 dan 2018 Kasus dan Barang Bukti Narkoba, Satuan Reserse Narkoba, Kepolisian Resor Bengkalis.

5 Peredaran Gelap Narkoba Melalui Laut hal. 36, dalam majalah SINAR. *Optimalkan Hukum dan Kerjasama Demi Indonesia Bebas Narkoba*. Edisi: VII – 2011. Badan Narkotika Nasional.

dan 263 kasus di tahun 2018.<sup>6</sup> Dari data tersebut menjelaskan bahwa peredaran narkoba yang tersebar di wilayah Bengkalis setiap tahunnya secara signifikan semakin meningkat.

Secara umum, dimensi ancaman yang paling menonjol dari masalah obat-obatan terlarang ini adalah sosial, terutama berkaitan dengan ancaman di bidang kesehatan individu. Hal ini seringkali menyebabkan negara, dalam hal ini aparat keamanan harus kerap kali memfokuskan diri pada penanganan masalah obat-obatan terlarang di tingkat domestik. Padahal, di sisi lain, masalah konsumsi tersebut tidak terlepas dari adanya suatu struktur *supply-demand* yang setidak-tidaknya mengaitkan negara-negara produsen, transit, dan konsumen. Hal inilah yang telah menjadikan masalah peredaran narkoba sebagai bagian dari kejahatan transnasional (*transnational crime*).<sup>7</sup>

Dari uraian tersebut, maka peneliti merumuskan sebuah pertanyaan penelitian, yaitu: “Bagaimana upaya Kepolisian Daerah Riau dalam mencegah kejahatan transnasional peredaran narkoba di wilayah Provinsi Riau?”

## **Kerangka Teori**

### **a. Perspektif Pluralisme**

Dalam perspektif pluralisme dijelaskan bahwasanya negara bukanlah aktor tunggal, melainkan terdiri dari aktor-aktor non negara lainnya yang dapat memengaruhi

---

6 Laporan Anev Tahun 2017 dan 2018 Kasus dan Barang Bukti Narkoba, Satuan Reserse Narkoba, Kepolisian Resor Bengkalis.

7 Tobing, Tobing, Fredy B. L. Drugs Trafficking sebagai Ancaman terhadap Negara. *Jurnal Politik Internasional*, Vol. 5 No. 1. November 2002. Depok. Laboratorium Hubungan Internasional. Jurusan Ilmu Hubungan Internasional. FISIP-Universitas Indonesia. hal. 78.

proses pengambilan kebijakan contohnya seperti para birokrat. Aktor-aktor non-negara jauh lebih penting daripada aktor negara. Aktor-aktor ini bisa berwujud kelompok-kelompok suku, etnis, atau separatis di dalam negara, berbagai kelompok kepentingan ekonomi dan perusahaan-perusahaan multinasional, dan bahkan bagian-bagian dari birokrasi pemerintah seperti aparat penjaga keamanan negara.

Peneliti menggunakan perspektif pluralisme karena penelitian ini akan menjelaskan peran para birokrat yakni aparat penjaga keamanan negara Kepolisian Daerah Riau (Polda Riau) yang bekerjasama dengan Polis Marin Wilayah Dua Polis Diraja Malaysia (PDRM) Johor Bahru dalam mengatasi kasus peredaran narkoba di wilayah Provinsi Riau khususnya dan perairan perbatasan Selat Malaka umumnya.

#### **b. Teori Kerjasama Internasional**

Tujuan utama suatu negara melakukan kerjasama internasional adalah untuk memenuhi kepentingan nasionalnya yang tidak dimiliki di dalam negeri. Untuk itu, negara tersebut perlu memperjuangkan kepentingan nasionalnya di luar negeri. Dalam kaitannya, diperlukan suatu kerjasama untuk mempertemukan kepentingan nasional antar negara.<sup>8</sup>

Sesuai dengan tujuannya, kerjasama internasional bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan bersama, karena dengan terciptanya hubungan kerjasama internasional dapat mempercepat proses peningkatan kesejahteraan dan penyelesaian masalah diantara dua atau lebih negara tersebut. Dengan demikian, dalam menangani peredaran narkoba yang

terjadi di wilayah Provinsi Riau, pihak Kepolisian Daerah Riau melakukan kerjasama dengan Polis Marin Wilayah Dua Polis Diraja Malaysia (PDRM) Johor Bahru untuk mencegah kasus tersebut guna mencapai tujuan yang diharapkan.

#### **c. Unit/Level Analisa Negara Bangsa**

Penelitian difokuskan pada tingkat analisa negara karena dalam hubungan internasional pada umumnya didominasi oleh perilaku negara bangsa. Asumsi dasar dari tingkat analisa ini bahwa semua pembuat keputusan, dimana pun berada, akan berperilaku sama jika menghadapi situasi yang sama pula. Sehingga, kenyataan yang ada dalam hubungan internasional lebih dicerminkan oleh perilaku negara bangsa yang selama ini dianggap sebagai aktor dominan dalam hubungan internasional. Oleh karena itu, untuk memahami hubungan internasional diperlukan pengkajian mengenai proses pembuatan keputusan tentang hubungan internasional terutama politik luar negeri suatu negara. Dengan kata lain, tingkat analisa ini melihat negara bangsa sebagai unit yang utuh.

Jadi, dalam penelitian ini karena Kepolisian Daerah Riau pada dasarnya adalah suatu lembaga yang memiliki fungsi pemerintahan dan bergerak di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, sebagai suatu lembaga atau organisasi kepolisian memiliki tugas dan wewenang yakni memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan serta memiliki kekuasaan untuk membuat kebijakan seperti bekerjasama dengan pihak lain baik internal maupun eksternal untuk menangani masalah peredaran narkoba.

---

8 Dam, Sjamsumar dan Riswandi. 1995. *Kerjasama ASEAN: Latar Belakang, Perkembangan, dan Masa Depan*. Jakarta: Ghalia Indonesia. hal. 15.

#### d. Konsep Keamanan Non-Tradisional

Merupakan konsep keamanan yang bersifat soft power berkaitan dengan isu sosial, budaya, lingkungan yang sering mencari sasaran pada tingkat masyarakat, kelompok, serta juga individu. Isu-isu keamanan yang baru seperti meningkatnya kejahatan transnasional dalam bentuk perdagangan narkoba, *human trafficking*, penyelundupan senjata, pencucian uang (*money laundering*), terorisme, bajak laut memaksa pemerintah untuk menyusun kembali agenda keamanan serta menciptakan mekanisme pemecahan masalah pada level regional melalui kerjasama internasional.<sup>9</sup>

#### Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang sifatnya deskriptif. Selanjutnya, tulisan ini dikembangkan melalui teknik pengumpulan data campuran. Teknik yang digunakan adalah dengan menghubungkan teori dan data dengan pengumpulan data yang berbasis primer yang didapat dari hasil wawancara serta hasil survey lapangan yang telah dituangkan dalam catatan lapangan (transkrip) dalam bentuk dokumen dan data sekunder yang didapat dari jurnal serta buku.

## II. HASIL DAN PEMBAHASAN

Provinsi Riau merupakan wilayah yang menjadi salah satu sasaran penyelundupan narkoba. Provinsi Riau terdiri dari banyak pulau yang terdapat didalamnya. Di sepanjang pesisir pulau tersebut dijadikan destinasi favorit untuk menyelundupkan narkoba karena banyaknya pelabuhan-pelabuhan tidak

resmi yang tersebar didalamnya sehingga sangat berpotensi untuk dijadikan sasaran penyelundupan narkoba. Didukung dengan letak pulau-pulainya yang berada dekat dengan perbatasan perairan internasional Selat Malaka menjadikan penyelundupan narkoba semakin meningkat. Hal ini dibuktikan dengan pernyataan yang diberikan oleh Badan Narkotika Nasional bahwasanya Provinsi Riau masuk ke dalam peringkat lima besar pasar narkoba yang tersebar di Indonesia dan menjadi peringkat paling atas di Pulau Sumatera untuk jalur masuk sindikat narkoba yang berasal dari Malaysia karena banyaknya pintu masuk yang minim penjagaan<sup>10</sup> terkhusus di sekitar pelabuhan-pelabuhan tidak resmi.

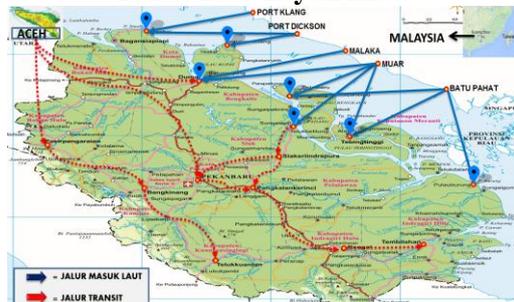
Pada umumnya, penyelundupan narkoba yang terjadi di wilayah Riau dari Malaysia mengalami peningkatan. Hal tersebut didukung karena adanya beberapa faktor yaitu yang pertama, dekatnya rute perjalanan dari Malaysia menuju Riau dengan jarak tempuh yang relatif singkat yang mengakibatkan tingginya lalu lintas peredaran narkoba yang terjadi di wilayah perbatasan Provinsi Riau. Yang kedua, masih kurangnya pengawasan terhadap penyelundupan narkoba terkhusus pengawasan yang dilakukan di sekitar pelabuhan-pelabuhan tidak resmi. Yang ketiga, upah yang ditawarkan kepada kurir cukup tinggi apabila berhasil menyelundupkan narkoba ke wilayah tertentu. Terdapat titik-titik kawasan yang rawan penyelundupan narkoba yang tersebar di Provinsi Riau. Berikut peta jalur pintu masuk peredaran

9 Jemadu, Aleksius. 2008. *Politik Global dalam Teori dan Praktik*. Yogyakarta: Graha Ilmu. hal. 142.

10 Syukur, M. 2019. <https://www.liputan6.com/regional/read/3933684/riau-nomor-satu-jalur-masuk-narkoba-asal-malaysia>. Diakses pada 16 Mei 2019, pukul 11:00 WIB.

narkoba yang berasal dari Malaysia menuju ke Provinsi Riau.

**Gambar 2.1**  
**Peta Masuk Narkoba Jalur Laut dan Darat ke Wilayah Riau**



Sumber: Direktorat Reserse Narkoba, Polda Riau

Keadaan geografi dan demografi merupakan faktor utama terjadinya ancaman keamanan yaitu penyelundupan narkoba yang terjadi di wilayah Provinsi Riau. Secara geografis, pesisir pantai wilayah Provinsi Riau berhadapan langsung dengan pantai maupun daratan Malaysia. Gambar peta diatas merupakan keterangan titik-titik wilayah yang rawan terjadinya penyelundupan narkoba dari negara tetangga Malaysia. Titik-titik wilayah tujuan penyelundupan narkoba tersebut itu pada umumnya berada di wilayah-wilayah kabupaten atau kota yang pada umumnya banyak terdapat wilayah perairan seperti Bagan Siapi-api, Kota Dumai, Pulau Rupat yang merupakan Pulau di Kabupaten Bengkalis, wilayah di sekitar Pulau Bengkalis, Sungaiapit, dan Pulau Burung. Penyelundupan yang terjadi di Provinsi Riau pada umumnya banyak berasal dari Port Klang, Port Dickson, Malaka, Muar, dan Batu Pahat.

Terdapat alasan mengapa wilayah-wilayah perairan banyak dijadikan sebagai tempat yang paling dicari bagi para pelaku sindikat narkoba internasional, yaitu karena pada dasarnya wilayah-wilayah pulau yang terdapat di Provinsi Riau terdapat

banyak sekali pelabuhan-pelabuhan yang tidak resmi yang minim sekali penjagaannya, salah satunya yaitu Pulau Bengkalis yang terdapat di Kabupaten Bengkalis.

Kabupaten Bengkalis merupakan wilayah yang terdiri dari beberapa pulau, salah satunya ialah Pulau Rupat yang berada sangat dekat dengan perairan Selat Malaka. Di sepanjang pulau ini sangat banyak sekali terdapat pelabuhan-pelabuhan tidak resmi yang minim sekali dari penjagaan. Hal ini mengakibatkan meningkatnya kasus penyelundupan narkoba di wilayah tersebut.

Di tahun 2017 terdapat sebanyak 186 kasus dengan jumlah 275 tersangka. Sementara itu, untuk tahun 2018 mengalami kenaikan sebanyak 263 kasus dengan jumlah tersangka sebanyak 389 orang. Adapun barang bukti narkoba yang ditemukan berupa ganja yang semula sebanyak 1.104,92 gram naik 4 kali lipat menjadi 5.030,36 gram di tahun 2018. Shabu yang dapat diamankan sebanyak 17.144,09 gram di tahun 2017 naik 4 kali lipat menjadi 64.971 gram. Untuk barang bukti ekstasi ditemukan sebanyak 2.398 butir pada 2017 naik berkali-kali lipat menjadi 47.981 butir pada tahun 2018, dan happy five sebanyak 150 butir naik berkali-kali lipat menjadi 10.188 butir di tahun 2018.<sup>11</sup>

Dengan banyaknya peningkatan kasus yang terjadi di wilayah Kabupaten Bengkalis, adapun upaya yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Bengkalis dalam mencegah ataupun menangani kasus peredaran narkoba yaitu dengan bekerjasama dengan instansi-instansi yang ada di dalam negeri ataupun instansi-instansi yang

11 Laporan Anev Tahun 2017 dan 2018 Pengungkapan Kasus dan Barang Bukti Narkoba, Satuan Reserse narkoba, Kepolisian Resor Bengkalis.

terkait mengenai narkoba, misalnya bekerjasama dengan Satresnarkoba Polres Bengkalis, Satpolair Polres Bengkalis, Ditpolair Polda Riau, Polisi Republik Indonesia, dan sebagainya.

Dalam menangani peredaran narkoba ini, strategi pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh Polres Bengkalis melalui satuan reserse narkoba pada umumnya yaitu melakukan langkah-langkah promotif/pre-emptif berupa pencegahan dengan memberikan sosialisasi ke masyarakat dan sekolah-sekolah, preventif berupa pencegahan dengan melakukan patroli bekerjasama dengan Satuan Kepolisian Perairan Polres Bengkalis, dan represif<sup>12</sup> berupa penindakan. Dalam pelaksanaan 3 langkah pencegahan tersebut melibatkan departemen dan instansi terkait maupun lembaga swadaya masyarakat.

### **Kerjasama Polda Riau dan Polis Marin Wilayah Dua Polis Diraja Malaysia (PDRM) Johor Bahru**

Untuk mengatasi peredaran narkoba di sekitar perairan perbatasan Selat Malaka, strategi pencegahan dan penanganan penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh Polda Riau melalui Direktorat Kepolisian Perairan dan jajaran dibawahnya pada umumnya melakukan kerjasama dengan Malaysia untuk melakukan pengawasan masuknya barang ilegal melalui jalur Selat Malaka.

Selat Malaka merupakan salah satu jalur pelayaran internasional tersibuk dan strategis di dunia. Di Selat Malaka terdapat beragam aktivitas, mulai dari aktivitas perdagangan, nelayan, sampai eksploitasi sumber daya lautnya. Namun di balik itu, pedagang narkoba

diduga ikut memanfaatkan wilayah strategis yang menjadi batas antara negara Indonesia dan Malaysia tersebut. Adanya sindikat narkoba tersebut diakui oleh Kepolisian Diraja Malaysia. Mereka menganggap perairan Selat Malaka menjadi pintu masuk, dan jalur peredaran narkoba dari dan ke negara Jiran tersebut. Namun, Kepolisian Diraja Malaysia telah berupaya melakukan penjagaan di kawasan tersebut. Penjagaan dilakukan dengan menempatkan pos-pos penjagaan di wilayah pesisir Selat Malaka. Selain itu juga melakukan peningkatan kerjasama dengan Kepolisian Daerah Riau serta jajaran dibawahnya.

Menyadari tingginya angka kriminalitas di perairan kelautan Selat Malaka, Direktorat Kepolisian Perairan (Ditpolair) Polda Riau mengadakan kerjasama dengan melakukan *rendezvous/pertemuan* dengan Polis Marin Wilayah Dua Polis Diraja Malaysia (PDRM) Johor Bahru tepatnya di tengah laut antara perairan perbatasan Bengkalis dan Selat Malaka pada 15 November 2017 dan di perairan Pematang Rupert pada 21 September 2018. Kerjasama ini memfokuskan pemberantasan peredaran narkoba yang saat ini sering terjadi di perairan Selat Malaka dengan melakukan patroli bersama dalam mengawasi masuknya barang ilegal dari Malaysia dan Indonesia.

Kerjasama ini merupakan kerjasama yang terus ditingkatkan di setiap tahunnya antara Kepolisian Daerah Riau beserta jajaran dibawahnya dan Polis Marin Wilayah Dua Polis Diraja Malaysia (PDRM) Johor Bahru dengan tujuan untuk dapat mengurangi angka kriminalitas di antaranya seperti penyelundupan narkoba di perairan Selat Malaka dan pulau-pulau yang terdapat di Provinsi

---

12 Anonym. 2007. *Mari Bersatu Memberantas Penyalahgunaan Narkoba (NAZA)*. Jakarta: BP. Dharma Bhakti. Hal. 9.

Riau seperti Pulau Bengkalis. Kerjasama ini difokuskan kepada masalah narkoba karena didapati isu masalah narkoba yang semakin hari semakin meningkat terkait penyelundupan narkoba di wilayah perairan.

#### **a. Pelaksanaan *Rendezvous* Tahun 2017**

Pada umumnya, pelaksanaan *rendezvous* tiap tahunnya berpindah-pindah tempat tergantung dari permintaan dari kedua belah pihak yakni Kepolisian Daerah Riau dengan Polis Marin Wilayah Dua Polis Diraja Malaysia (PDRM) Johor Bahru. Pada tahun 2017, pelaksanaan *rendezvous* dilaksanakan pada tanggal 15 November 2017 di perbatasan perairan Selat Malaka dengan Kabupaten Bengkalis dengan titik koordinat 01°36'30" N – 102°32'00" E. Pembahasan pokok pada pertemuan ini berupa maraknya penyelundupan rokok di Malaysia, TKI ilegal, peredaran narkoba, dan kejahatan transnasional lainnya.

#### **b. Pelaksanaan *Rendezvous* Tahun 2018**

Pada tahun 2018, pelaksanaan *rendezvous* dilaksanakan pada tanggal 21 September 2018 di perairan perairan Pematang Rupert pada titik koordinat Lat 01°58'40" N / Long 102°32'00" E. Pelaksanaan ini merupakan kelanjutan dari pelaksanaan *rendezvous* di tahun sebelumnya guna meningkatkan hasil dan upaya mekanisme kinerja yang telah dilakukan. Pada umumnya materi yang disampaikan oleh kedua belah pihak selalu saja terkait dengan masalah kejahatan transnasional yang terjadi di antara kedua belah negara meliputi narkoba, penyelundupan bawang, dan sebagainya.

#### **c. Hasil Pelaksanaan *Rendezvous* Tahun 2017 dan Tahun 2018**

Secara umum, dari pelaksanaan *rendezvous* antara Ditpolair Polda Riau beserta jajaran dibawahnya dengan Polis Marin Wilayah Dua Polis Diraja Malaysia (PDRM) Johor Bahru yang dilakukan secara rutin setiap tahun, pada dasarnya hasil pelaksanaan di setiap tahunnya tidak ada perbedaan yakni dengan diperoleh kesepakatan sebagai berikut:

1. Kedua belah pihak sepakat akan melakukan tukar-menukar informasi melalui sarana komunikasi yang ada baik telepon, email, fax, dan lain-lain guna kecepatan penanganan apabila ada tangkapan dari pihak Malaysia yang berasal dari Indonesia dan sebaliknya, apabila ada tangkapan Indonesia yang berasal dari Malaysia dan kedua belah pihak sepakat akan mengembangkan kasus tersebut. Hal ini terkait dengan permasalahan yang sering terjadi terkait kasus TKI ilegal, yangmana jika di Malaysia terdapat ditemukannya TKI ilegal yang berasal dari Indonesia tanpa memiliki identitas paspor secepatnya akan di konfirmasi atau dilaporkan kepada Kepolisian Daerah Riau oleh pihak PDRM. Setelah mendapat laporan tersebut, biasanya Polda Riau akan meminta bantuan agar TKI tersebut dipulangkan ke Indonesia dan tidak ditahan di Malaysia. Dengan adanya *rendezvous* dari pelaksanaan kerjasama antara kedua pihak ini, kini pihak Polda Riau bisa bernegosiasi dengan pihak PDRM karena tujuan diadakannya kerjasama ini adalah untuk membantu penyelesaian terkait suatu kasus perkara.

2. Adanya kesepahaman antara ditpolair Polda Riau dan PDRM bila ada dugaan terjadinya tindak pidana di perairan perbatasan, agar dapat dikoordinasikan dalam kewenangan *police to police* sebelum diangkat ke *government to government*. Pada point kesepakatan ini, sebelum suatu kasus perkara diangkat ke pengadilan, kedua belah pihak melakukan negosiasi contohnya terkait kasus pengejaran pelaku narkoba. Jika di wilayah perairan kita terdapat pelaku kejahatan narkoba yang membawa narkoba dan menuju ke wilayah perbatasan Malaysia, maka kita harus meminta izin terlebih dahulu untuk dapat masuk ke wilayah Malaysia tersebut. Jika telah dikonfirmasi oleh pihak PDRM dan telah diizinkan untuk melanjutkan pengejaran terputus tersebut (*hot pursuit*), maka nantinya jika pelaku berhasil ditangkap, akan dihukum dengan menggunakan Undang-undang Tindak Pidana yang terdapat di yurisdiksi Indonesia, begitupun sebaliknya.
3. Kedua belah pihak sepakat akan memperketat patroli perairan guna mencegah tindak pidana yang diduga lewat perairan. Pelaksanaan patroli ini dilakukan oleh kedua belah pihak di wilayah perairan masing-masing. Pada pelaksanaan point ini, patroli diadakan oleh personel Direktorat Kepolisian Perairan (Ditpolair) Polda Riau. Ditpolair secara rutin melakukan patroli setiap bulan dengan durasi pengawasan tiap harinya dibatasi selama 4 jam saja tergantung kondisi pantauan cuaca. Jika cuaca pada saat itu buruk, maka tidak dilakukan kegiatan rutinitas patroli tersebut, dan sebaliknya. Patroli ini dilakukan untuk menyisir wilayah-wilayah perairan perbatasan yang terdapat di Provinsi Riau terkhususnya di Pulau Bengkalis karena letak perbatasan perairan Selat Malaka berada di belakang pulau ini. Setiap melaksanakan patroli, terdapat 8 armada kapal yang diturunkan. Khusus untuk wilayah perbatasan perairan internasional Selat Malaka, dikirimkan 2 kapal untuk melakukan pengawasan di wilayah tersebut sementara 6 kapal lainnya disebar ke wilayah-wilayah yang memiliki wilayah perairan seperti Rokan Hilir, Dumai, Siak Sri Indrapura, Pelalawan, Indragiri Hilir, dan sebagainya.
4. Adanya kesepahaman antara Ditpolair Polda Riau dan Pasukan Polis Marin Wilayah Dua Polis Diraja Malaysia (PDRM) Johor Bahru sepakat melaksanakan kegiatan *rendezvous* dan patroli bersama di perairan perbatasan kedua negara secara berkesinambungan.<sup>13</sup> Pelaksanaan *rendezvous* ini rutin dilakukan sejak tahun 1980an. Ketika itu, wilayah Provinsi Riau belum terbagi menjadi dua dengan pisahnya Kepulauan Riau dari Provinsi Riau. Dahulu kerjasama ini terbagi menjadi dua terkait menangani kejahatan transnasional yang terdapat di wilayah perbatasan negara, yaitu Indosin (Indonesia-Singapura) dan Malindo (Malaysia-Indonesia). Karena sekarang wilayah Kepulauan Riau telah menjadi salah satu provinsi yang

---

13 Laporan Hasil Pelaksanaan *Rendezvous* Tahun 2017 dan 2018, Direktorat Kepolisian Perairan Kepulauan Riau .

terdapat di Indonesia dan wilayahnya sangat berdekatan dengan Singapura, maka kerjasama terkait menangani kejahatan transnasional dilakukan oleh Provinsi Kepulauan Riau untuk yang berbatasan langsung dengan Singapura (Indosin). Begitu juga sebaliknya, karena letak wilayah Provinsi Riau berada dekat dengan negara Malaysia, maka untuk pelaksanaan kerjasama Malindo, Provinsi Riau menjadi objek fokus pelaksana penanganan kasus kejahatan transnasional tersebut. Kegiatan *rendezvous* ini dilakukan rutin setiap tahun untuk bisa meningkatkan mekanisme kinerja terkait dalam pengembangan suatu kasus kejahatan transnasional yang terjadi di wilayah perairan kedua belah pihak tersebut, selain itu juga untuk mempererat hubungan kerjasama antar negara khususnya di perairan, serta mendapatkan informasi dari hasil penukaran informasi terkait kasus kejahatan transnasional yang legal ataupun tidak legal. Biasanya setelah pelaksanaan *rendezvous* ini selesai, pihak Direktorat Kepolisian Perairan yang menjadi perwakilan dari Kepolisian Daerah Riau dalam pelaksanaan *rendezvous* ini bersama Pasukan Polis Marin Wilayah Dua Polis Diraja Malaysia (PDRM) Johor Bahru mengadakan patroli gabungan setelah selesai mengadakan pertemuan. Patroli tersebut menyisir perairan yang ada di perbatasan Selat Malaka.<sup>14</sup>

#### **d. Implementasi Hasil Kerjasama dalam Pelaksanaan *Rendezvous* antara Polda Riau dan Polis Marin Wilayah Dua PDRM Johor Bahru**

Adapun implementasi dari kesepakatan kerjasama dalam menangani kasus peredaran narkoba di wilayah perbatasan perairan internasional Selat Malaka yaitu melalui tukar-menukar informasi dengan adanya keberhasilan kerjasama antara Polda Riau beserta jajaran dibawahnya dan Polis Diraja Malaysia (PDRM) yang mengusut kasus Muhammad Azizi.

Kronologis penangkapan ini dilakukan pada tanggal 07 Februari 2014 pada pukul 13.00 WIB, tim operasional Satuan Reserse Narkoba Polres Bengkalis mendapatkan informasi tentang adanya kegiatan transaksi narkoba di Jalan Utama, Desa Jangkang, Kecamatan Bantan, Kabupaten Bengkalis. Dilakukanlah pengamatan dan pengintaian di sekitar wilayah tersebut dan pada pukul 14.00 WIB dilakukan penggerebekan terhadap rumah pelaku yang dicurigai. Tim operasional Satuan Reserse Narkoba Polres Bengkalis berhasil menangkap 3 orang laki-laki dalam kamar depan rumah tersebut.

Berdasarkan hasil putusan MA, Muhammad Azizi ditetapkan ditahan selama 15 tahun penjara di lapas Bengkalis. Namun pada saat menjalankan hukuman tahanan selama 3 tahun berjalan dari total lama pidana 15 tahun yang ditetapkan, Muhammad Azizi berhasil kabur.

Dari hasil informasi yang didapatkan oleh pihak PDRM yang merupakan kesepakatan antara kedua belah pihak dalam tukar-menukar informasi terkait pengimplementasian kasus peredaran narkoba ini, Azizi ditangkap membawa 15 kg sabu-sabu

---

14 Hasil Wawancara dengan Kompol Syamsuddin, selaku Kepala Seksi Penyidikan Direktorat Kepolisian Perairan Polda Riau. Pada 14 Mei 2019.

saat berada di Bukit Aman, Malaysia. Pihak Polda Riau beserta jajaran dibawahnya bersama PDRM secara intensif melakukan komunikasi terkait peredaran narkoba terkait kasus ini. Termasuk penangkapan yang dilakukan terhadap Azizi yang sebelumnya menjalani proses hukuman di Bengkalis.

Untuk proses hukuman, Polda Riau dan PDRM telah bersepakat untuk melanjutkan penanganan kasus tersebut di Malaysia melalui negosiasi yang panjang di antara kedua belah pihak. Di negara Malaysia, jika didapati mengedarkan narkoba lebih dari 500 gram, maka pelaku akan dihukum mati. Polda Riau memilih hukuman terberat bagi Azizi. Karena di Malaysia ia dituntut hukuman mati, maka kedua belah pihak telah sepakat untuk dihukum di sana. Komunikasi Polda Riau dan PDRM terus ditingkatkan untuk menghadapi peredaran narkoba lintas negara ini. Karena batas negara yang berdekatan, Riau terutama di Kabupaten Bengkalis sering menjadi pintu keluar masuk narkoba yang berasal dari Malaysia.<sup>15</sup>

Terkait mengenai perkembangan kasus Azizi di Malaysia, pihak Polda Riau dan jajaran di bawahnya seperti Polres Bengkalis mendapati informasi bahwasanya Azizi kini telah lepas dari tahanan Malaysia karena para saksi-saksi lainnya (teman-teman Azizi) yang juga tertangkap tidak ada memberikan pernyataan yang memberatkan untuk memberikan kesaksian pada saat pelaksanaan sidang perkara Azizi. Sehingga, dengan begitu Azizi bisa

dilepaskan dari tahanan tanpa jaminan apapun.<sup>16</sup>

### III. KESIMPULAN

Globalisasi merupakan faktor yang menyebabkan kejahatan transnasional terjadi. Terciptanya *state borderless* telah mengurangi kemampuan suatu negara dalam melakukan kontrol politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Dengan semakin mudarnya batas kedaulatan suatu negara, membuat para oknum kejahatan transnasional dengan mudah melintasi batas negara yang didukung dengan kecanggihan teknologi, komunikasi, dan informasi sehingga berpotensi untuk terjadinya kejahatan transnasional salah satunya peyelundupan narkoba. Faktor penyebab yang menyebabkan terjadinya kejahatan transnasional di berbagai belahan dunia adalah karena hilangnya batas kedaulatan suatu negara. Dengan begitu, mengakibatkan sulitnya pengawasan pemerintah negara terutama di titik-titik masuk ke wilayah terpencil yang sulit dijangkau oleh pemerintah negara menyebabkan mudahnya oknum kejahatan transnasional ini bergerak. Selain itu, negara yang menganut sistem demokrasi menyebabkan setiap individu maupun kelompok secara bebas melakukan interaksi lintas batas negara.

Provinsi Riau, merupakan provinsi yang terdiri dari banyaknya kepulauan dan aliran anak sungai khususnya di Kabupaten Bengkalis yang terdapat berbagai jumlah pelabuhan resmi dan tidak resmi di dalamnya. Letaknya yang strategis berbatasan langsung dengan perbatasan perairan Selat Malaka memudahkan terjadinya

---

15 Latif, Abdul. 2018. <https://www.cakaplah.com/berita/baca/2018/11/10/kabur-dari-lapas-bengkalis-wna-bandar-narkoba-ditangkap-di-malaysia-dan-dihukum-mati#sthash.ykPtLH51.kRwtHw0u.dpbs>. Diakses pada 23 April 2019, pukul 13:09 WIB.

---

16 Hasil Wawancara dengan Brigadir Efendi Ali, S.H., selaku Perwira Urusan Bantuan Hukum (Paur Bankum) Polres Bengkalis. Pada 15 Mei 2019.

kejahatan transnasional di sekitar wilayah perairan Provinsi Riau ini. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya kasus dan barang bukti yang berhasil diungkap oleh Kepolisian Daerah Riau serta Kepolisian Resor Bengkalis di sekitar wilayahnya. Kebanyakan kasus tersebut berupa peredaran dan penyelundupan narkoba yang secara langsung beredar dari negara tetangga Malaysia.

Setiap tahunnya, peredaran narkoba yang terjadi di Provinsi Riau khususnya di Kabupaten Bengkalis selalu mengalami peningkatan secara signifikan. Hal ini membuat Polda Riau beserta jajaran dibawahnya seperti Polres Bengkalis mengalami kesulitan dalam menangani kasus tersebut. Untuk bisa meminimalisir terjadinya kasus peredaran narkoba ini, Polres Bengkalis telah melakukan beberapa pencegahan yang dilakukan dengan bekerjasama dengan instansi-instansi yang terkait guna mengurangi angka peredaran narkoba yang terjadi di wilayah Kabupaten Bengkalis. Melalui Satuan Reserse Narkoba, Polres Bengkalis bekerjasama dengan Satuan Kepolisian Perairan Polres Bengkalis untuk bersama-sama melakukan patroli dilaut serta menyisir perairan pesisir khususnya di wilayah yang terdapat pelabuhan-pelabuhan tikus. Selain itu, upaya lainnya yang telah dilakukan ialah melakukan beberapa upaya seperti pre-emptif berupa sosialisasi, preventif berupa patroli, dan represif. Secara umum, untuk dapat mencegah kasus yang marak terjadi di wilayah sekitar perbatasan antara Provinsi Riau dan Malaysia, aparat Polda Riau yang diwakili Direktorat Kepolisian Perairan Polda Riau beserta Satuan Kepolisian Perairan Polres Bengkalis melakukan kerjasama dengan Polis Marin Wilayah Dua Polis Diraja Malaysia (PDRM) Johor Bahru dengan melaksanakan

pertemuan/ *rendezvous* di tengah laut di atas kapal dalam rangka membahas pengurangan angka kriminalitas di wilayah perbatasan kedua negara. Letak pertemuan kerjasama tersebut berada di antara perbatasan Bengkalis dengan perairan Selat Malaka di tahun 2017 sementara di tahun 2018 berada di perairan Pematang Rupert. Kerjasama ini memfokuskan pemberantasan peredaran narkoba yang saat ini sering terjadi di perairan Selat Malaka dan Provinsi Riau terkhususnya di Kabupaten Bengkalis dengan melakukan patroli bersama dalam mengawasi masuknya barang ilegal dari Malaysia dan Indonesia.

Secara umum, pertemuan ini membahas tentang peningkatan kerjasama dan koordinasi terutama pada persoalan upaya pemberantasan terhadap peredaran gelap narkoba. Selama ini, narkoba yang masuk ke Indonesia terutama melewati perairan Provinsi Riau khususnya Kabupaten Bengkalis, sebagian besar berasal dari Malaysia baik itu narkoba jenis sabu-sabu maupun ekstasi. Kini para pelaku narkoba memanfaatkan pulau terluar Indonesia sebagai tempat transit.

Polda Riau berkoordinasi dengan Ditpolair Polda Riau untuk bekerjasama dengan Kepolisian Diraja Malaysia untuk melakukan pengawasan di perbatasan. Jika ada yang kena tangkap di perairan Bengkalis dan terindikasi memiliki jaringan di Malaysia, maka secepatnya akan dikomunikasikan dengan pihak PDRM.

Hasil dari pelaksanaan *rendezvous* antara Ditpolair Polda Riau beserta jajaran dibawahnya dengan Pasukan Polis Marin Wilayah Dua Polis Diraja Malaysia (PDRM) Johor Bahru yakni *pertama*, kedua belah pihak sepakat akan melakukan tukar-menukar informasi melalui sarana komunikasi yang ada baik telepon, email, fax, dan

lain-lain guna kecepatan penanganan apabila ada tangkapan dari pihak Malaysia yang berasal dari Indonesia dan sebaliknya, apabila ada tangkapan Indonesia yang berasal dari Malaysia dan kedua belah pihak telah sepakat akan mengembangkan kasus tersebut. *Kedua*, adanya kesepahaman antara ditpolair Polda Riau dan PDRM bila ada dugaan terjadinya tindak pidana di perairan perbatasan, agar dapat dikoordinasikan dalam kewenangan *police to police* sebelum diangkat ke *government to government*. *Ketiga*, kedua belah pihak sepakat akan memperketat patroli bersama di perairan perbatasan kedua negara secara berkesinambungan guna mencegah tindak pidana yang diduga lewat perairan. *Keempat*, kedua belah pihak sepakat akan melaksanakan *rendezvous* kembali di tahun depan untuk mempererat hubungan kerjasama antar negara khususnya di perairan.

Implementasi dari kesepakatan kerjasama dalam menangani kasus peredaran narkoba di wilayah perbatasan perairan Provinsi Riau dan Selat Malaka yaitu keberhasilan kerjasama antara Polisi Diraja Malaysia (PDRM) dan Polda Riau beserta jajaran dibawahnya yang menangkap Muhammad Azizi. Kedua belah pihak saling bertukar informasi melalui komunikasi untuk bersepakat menentukan hukuman apa yang akan diterima oleh Muhammad Azizi. Kesepakatan tersebut tercapai setelah menentukan hukuman yang diterima oleh Muhammad Azizi akan dilaksanakan di Malaysia berupa hukuman mati. Namun pada kenyataannya, informasi terbaru yang diberikan oleh pihak PDRM kepada Polda bahwasanya Azizi bebas dari tahanan karena tidak adanya saksi-saksi yang memberatkan tersangka terkait

kasus penyelundupan narkoba yang dilakukan.

### Referensi:

- Mely Cabalero-Anthony. *Challenging Change: Non Traditional Security, Democracy and Regionalism*, dalam K. Emmerson. 2009. *Hard Choices: Security, Democracy and Regionalism in Southeast Asia*. Singapura: ISEAS Publishing.
- Sarah dan Pazli. 2014. Efektifitas ASOD (Asean Senior Officials on Drugs Matters) dalam Menanggulangi Industri Narkotika di Kawasan ASEAN 2004-2009. *Jurnal Transnasional*, Vol. 5, No. 2. Universitas Riau: FISIP.
- Tobing, Tobing, Fredy B. L. Drugs Trafficking sebagai Ancaman terhadap Negara. *Jurnal Politik Internasional*, Vol. 5 No. 1. November 2002. Depok. Laboratorium Hubungan Internasional. Jurusan Ilmu Hubungan Internasional. FISIP-Universitas Indonesia.
- Wang, Peng dan Jingyi Wang. 2009. Transnational Crime: Its Containment Through International Cooperation. *Asian Social Science*, Vol. 5, No. 11.
- Anonym. 2007. *Mari Bersatu Memberantas Penyalahgunaan Narkoba (NAZA)*. Jakarta: BP. Dharma Bhakti.
- Dam, Sjamsumar dan Riswandi. 1995. *Kerjasama ASEAN: Latar Belakang, Perkembangan, dan Masa Depan*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Jemadu, Aleksius. 2008. *Politik Global dalam Teori dan Praktik*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Peredaran Gelap Narkoba Melalui Laut hal. 36, dalam majalah SINAR.

- Optimalkan Hukum dan Kerjasama Demi Indonesia Bebas Narkoba*. Edisi: VII – 2011. Badan Narkotika Nasional.
- Laporan Anev Tahun 2017 dan 2018 Kasus dan Barang Bukti Narkoba, Satuan Reserse Narkoba, Kepolisian Resor Bengkalis.
- Laporan Anev Tahun 2017 dan 2018 Pengungkapan Kasus dan Barang Bukti Narkoba, Direktorat Reserse Narkoba, Polda Riau.
- Laporan Hasil Pelaksanaan Rendezvous Tahun 2017 dan 2018, Direktorat Kepolisian Perairan Polda Riau.
- Hasil Wawancara dengan Kompol Syamsuddin, selaku Kepala Seksi Penyidikan Direktorat Kepolisian Perairan Polda Riau. Pada 14 Mei 2019.
- Hasil Wawancara dengan Brigadir Efendi Ali, S.H., selaku Perwira Urusan Bantuan Hukum (Paur Bankum) Polres Bengkalis. Pada 15 Mei 2019.
- Latif, Abdul. 2018. <https://www.cakaplah.com/berita/baca/2018/11/10/kabur-dari-lapas-bengkalis-wna-bandar-narkoba-ditangkap-di-malaysia-dan-dihukum-mati#sthash.ykPtLH51.kRwtHw0u.dpbs>. Diakses pada 23 April 2019, pukul 13:09 WIB.
- Syukur, M. 2019. <https://www.liputan6.com/regional/read/3933684/riau-nomor-satu-jalur-masuk-narkoba-asal-malaysia>. Diakses pada 16 Mei 2019, pukul 11:00 WIB.